

EVALUASI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH: UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI I SUNGAI PAKNING

Arbi dan Lisdawati

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Email : lisdawati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang berpartisipasi bagi masyarakat tersebut adalah melalui wadah yang disebut Komite Sekolah. Kajian peningkatan kualitas atau mutu pendidikan ini merupakan penelitian lapangan yang lebih banyak memfokuskan penelitian ilmiahnya ke arah: (1) Mengadakan berbagai evaluasi dan identifikasi baik dari segi evaluasi dan identifikasi potensi, hambatan maupun evaluasi dan identifikasi kebutuhan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan; (2) Melakukan evaluasi terhadap penyusunan program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (stakeholders). Kajian ini menunjukkan bahwa program kerja Komite Sekolah yang paling awal dan paling mendasar adalah harus melakukan berbagai evaluasi dan identifikasi hambatan yang melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi terhadap berbagai hambatan berpartisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning itu, barulah disusun beberapa program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Adapun program kerja Komite Sekolah yang utama dan yang diprioritaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning yang telah tersusun adalah : (1) Pelatihan tentang Komite Sekolah agar masyarakat (orangtua siswa) mengetahui hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi di Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning; (2) Penerapan subsidi silang yaitu masyarakat (orangtua siswa) yang mampu secara ekonomi memberikan subsidi kepada siswa yang kurang mampu secara finansial; (3) Pelibatan orangtua siswa sebagai panitia dalam kegiatan di sekolah dan pertemuan rutin antara orangtua siswa, Komite Sekolah dan para guru.

Kata kunci : *Evaluasi, Identifikasi, Program Kerja, Komite Sekolah*

PENDAHULUAN

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dalam tanggungjawab pembangunan berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga diberikan kepada satuan pendidikan, baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,

melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, dan masyarakat atau *stakeholders* pendidikan.

Hal ini relevan dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based development participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).

Akan tetapi, salah satu masalah mendasar dalam bidang pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001).

Mutu pendidikan di Indonesia selama ini masih belum mengalami peningkatan yang signifikan dan merata. Sebagian sekolah, terutama di kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun sebagian besar lainnya terutama di daerah masih memprihatinkan.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2001) terdapat sedikitnya tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu :

1. Pendekatan *education production fuction* atau *input-output analysis* yang digunakan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dilaksanakan secara konsekuen.
2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik.
3. Peranserta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat yang selama ini umumnya lebih banyak bersifat dukungan moril, saran-saran sekedarnya saja, bukan pada *proses* pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).

Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001).

Untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dibentuklah suatu wadah yang diberi nama Komite Sekolah.

Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non *profit* dan non

politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para *stakeholders* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dikatakan bahwa Komite Sekolah merupakan dampak wujud dari otonomi pendidikan, melalui demokratisasi pendidikan. Wujud dari kebijaksanaan ini adalah kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam menumbuhkembangkan pendidikan. Hal ini, sejalan dengan apa yang disebut dengan *community based education*, dan secara tidak langsung imbas dari *school based management*.

Dibentuknya Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning pada tanggal 20 Februari 2003 dimaksudkan agar masyarakat mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning tersebut.

Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning yang telah terbentuk itu, terdiri dari berbagai stakeholders yaitu orangtua siswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan industri, serta berfungsi sebagai suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Keberadaan orangtua siswa, tokoh masyarakat dan alumni berpotensi berpartisipasi dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Untuk itu Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning harus memiliki program kerja yang jelas dan melakukan kegiatan terarah serta terukur, yang dapat dilihat dari proses identifikasi dan penyusunan program kerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang dimaksudkan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ilmiah ini, secara garis besarnya dapat diutarakan sebagai berikut: apakah yang menjadi potensi, hambatan dan kebutuhan dalam menyusun program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?

Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi apa yang menjadi potensi, hambatan dan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.
2. Untuk mengevaluasi penyusunan proram kerja sebagai suatu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (*stakeholders*), antara lain: kepala sekolah, guru, masyarakat (orangtua siswa), pengurus Komite Sekolah dan himpunan alumni SMP Negeri I Sungai Pakning.

Manfaat dan Urgensi

Penelitian lapangan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dan urgensinya sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi atau masukan kepada bapak/ibu guru, kepala sekolah, masyarakat (orangtua siswa), himpunan alumni SMP Negeri I Sungai Pakning dan semua lembaga terkait yang penulis teliti.
2. Sebagai bahan informasi atau masukan kepada bapak/ibu yang tergabung dalam Komite Sekolah (pengurus) di SMP Negeri I Sungai Pakning yaitu bagaimana caranya menarik partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dan menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Tinjauan Pustaka

1. Penyajian Berbagai Makna Partisipasi

Makna yang lazim ditujukan untuk suatu partisipasi adalah keikutsertaan suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar (Poerbakawatja, 1980). Kelompok kajian Bank Dunia menjelaskan bahwa partisipasi adalah sebagai suatu proses para pemilik kepentingan (*stakeholders*) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif serta keputusan pembangunan atas sumberdaya yang berdampak pada mereka (Lewis dan Waker, 2001). Berdasarkan sudut pandang tersebut, partisipasi dapat dilihat dari tataran konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua siklus tahapan proyek, dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi (Lewis dan Waker, 2001).

Mikkelsen (2001) memaparkan pula makna konkrit partisipasi adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung makna atau arti bahwa orangtua kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- b. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditemukannya sendiri.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan kriteria objektif yang dijadikan acuan dalam penggunaan istilah partisipasi, menurut Pamuji (1997) adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi mengacu kepada adanya beberapa subyek yang berinteraksi, ialah individu (perorangan) yang berada dalam suatu unit masyarakat (kelompok), organisasi, perkonomian, pemerintahan, bangsa, dimana masing-masing mempunyai keleluasan untuk mengambil keputusannya sendiri-sendiri, tetapi terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau rencana bersama.
- b. Terdapat kerelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan

yang diberikan oleh kelompoknya secara ikhlas. Keikutsertaan anggota tidak ditimbulkan oleh kekuasaan yang dipunyai oleh pemimpin. Dengan demikian, mobilisasi bukan masuk kategori partisipasi.

- c. Partisipasi berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan sesuatu kegiatan (pengambilan keputusan bersama, penerahan sumberdaya, pengawasan, dan penyesuaian).
- d. Kelompok sasaran dari partisipasi adalah rakyat banyak.

Berdasarkan beberapa makna partisipasi dari berbagai pendapat di atas, maka apabila dihubungkan dengan pendidikan, yang dimaksud partisipasi adalah peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tahap penyusunan program pendidikan sekolah, pelaksanaan dan sampai tahap pengawasan pelaksanaan kegiatan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu perlu juga disusun program kerja Komite Sekolah secara terarah dan terukur.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Partisipasi Masyarakat

Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia. Unsur-unsur yang harus terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain: kepemimpinan kepala sekolah, kualitas guru, sarana dan prasarana, peranan orangtua siswa, peranan masyarakat setempat, peranan pemerintah daerah dan semua pihak terkait (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001). Adanya anggapan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan wewenang lembaga pendidikan saja adalah pandangan yang keliru. Peningkatan kualitas tersebut memerlukan partisipasi dari masyarakat luas.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat penting perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan dan kewibawaan orangtua siswa di dalam kegiatan sekolah dengan

keberhasilan peserta didik (Hobson, seperti dikutip oleh Wahjosumidjo, 2002).

Oleh karena itu di dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, maka seluruh unsur yang terlibat dapat difungsikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan tidak diserahkan kepada sekolah saja. Sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya. Tugas dan tanggungjawab pendidikan anak-anak di sekolah adalah tanggungjawab masyarakat di samping sekolah dan pemerintah (Purwanto, N. 1987).

Adanya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan daerah-daerah berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lokal melalui pembangunan fisik dan nonfisik. Sebelum adanya UU tersebut, pembangunan bersifat sentralistik sehingga tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat dan memotivasi partisipasinya merupakan strategi dalam wacana pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people central development*). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan maksimal melalui redistribusi modal atau kepemilikan (Kocten, seperti dikutip oleh Sahidu, 1998).

3. Kajian Beberapa Aspek Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).

Komite Sekolah merupakan badan atau lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis

oleh para *stakeholders* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).

Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik, artinya, adalah nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.

b. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Menurut (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (2002) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, dan mempunyai penyebaran yang amat beragam.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah bersangkutan memiliki kemandirian masing-masing, tetapi sebagai mitra yang harus saling bekerjasama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, (2001), peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik dalam wujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan sekolah di satuan pendidikan.

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, (2001), Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c. Kriteria kerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga kependidikan
 - e. Kriteria fasilitas kependidikan
- 1) Mendorong orangtua siswa dan masyarakat supaya berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

d. Perbandingan antara Komite Sekolah dan BP3

Pada tahun 2002, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia membuat kebijakan pembentukan wadah Komite Sekolah sebagai pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Keberadaan Komite Sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka Komite Sekolah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Menurut Prishardoyo (2002) terdapat perbedaan mendasar antara Komite Sekolah dengan BP3. Secara garis besar BP3 cenderung *top down* dari proses pembentukan sampai pada pelaksanaan peranannya, sedangkan Komite Sekolah lebih aspiratif dan melibatkan berbagai *stakeholders* pendidikan di sekolah.

Metodologi Penelitian

1. Konsep, Teori dan Dasar Pemikiran

Salah satu masalah mendasar dalam bidang pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat melalui partisipasi dari

masyarakat dan seluruh *stakeholders* pendidikan di sekolah.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2002) sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk satu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang disebut Komite Sekolah.

Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).

Pelaksanaan Komite Sekolah dipercayai dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah membutuhkan partisipasi masyarakat (dalam hal ini adalah orangtua siswa). Untuk itu perlu disusun program kerja Komite Sekolah secara terarah dan terukur.

Penyusunan program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : (1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi, hambatan dan kebutuhan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, melalui kondisi sosial yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, selanjutnya melakukan observasi lapangan untuk memperoleh data partisipasi masyarakat (orangtua siswa) yang dibandingkan dengan partisipasi guru dan pengurus Komite Sekolah. (2) Mengevaluasi penyusunan program kerja meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan pendidikan, dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (*stakeholders*), antara lain : kepala sekolah, guru, masyarakat (orangtua siswa), pengurus Komite Sekolah dan himpunan alumni di sekolah tersebut. Penyusunan program kerja Komite Sekolah

mengutamakan partisipasi semua *stakeholders* untuk mewujudkan rasa memiliki dan tanggungjawab dalam kegiatan pendidikan, sehingga akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu.

2. Metode atau Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif (studi kasus). Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada aspek proses daripada hasil atau produk-produknya.

Moleong (2004) menegaskan pula bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan aspek proses daripada hasil, disebabkan oleh keterkaitan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih baik apabila diamati dalam prosesnya. Spradley (1980) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu usaha untuk menemukan makna berdasarkan pada partisipan.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) sebagai berikut : 1) sumber data alami, 2) peneliti sebagai instrumen kunci, 3) mengutamakan proses daripada hasil, 4) menganalisis data secara induktif dan 5) makna yang dimiliki oleh peneliti didasarkan pada tingkahlaku mereka sebagai aspek esensial dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan kepada beberapa paparan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif (studi kasus) dengan alasan: 1) peneliti akan mengungkapkan informasi sebagaimana adanya, 2) peneliti lebih mengutamakan proses daripada hasil, 3) penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang, 4) peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 5) latar atau setting penelitian bersifat alamiah dan kasus, 6) cara pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah secara pengamatan dan wawancara mendalam, dan 7) analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif atau induktif.

3. Analisis Informan

Menurut Singarimbun (1981) informan atau subjek penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi setting penelitian.

Selanjutnya menurut Singarimbun, kriteria informan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain : 1) responsif terhadap keadaan lingkungan, 2) dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi pengumpulan data, 3) Memanfaatkan imajinasi, kreatifitas dan memandang dunia ini sebagai suatu kebutuhan, 4) subjek mempunyai pengetahuan yang luas dan kemampuan berfikir yang baik, dan 5) mampu menjelaskan informasi yang tepat. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, pengurus Komite Sekolah dan masyarakat (orangtua siswa) itu sendiri yang disebut juga sebagai informan kunci (*Key Informan*).

3. Analisis Data, Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data menurut Muhajir (1998) merupakan proses mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dengan proses demikian lazim digunakan dalam studi kualitatif. Analisis data dengan proses demikian, biasanya dikenal dengan "***Analisis Deskriptif Kualitatif***".

Reduksi data dilakukan dengan cara menulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dengan perkataan lain, temuan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, dan disusun secara lebih sistematis.

Penyajian data dilakukan secara naratif atau narasi yaitu penyajian data secara deskriptif yang dilakukan dengan cara memaparkan apa adanya secara objektif data hasil temuan lapangan sesuai pertanyaan penelitian. Selanjutnya kesimpulan dibuat sesuai dengan temuan lapangan dan mengacu kepada pertanyaan penelitian tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi kerja penelitian lapangan untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi penyusunan program kerja Komite Sekolah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa peneliti sangat mengenal dan sangat meyakini dengan pemilihan lokasi tersebut penelitian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Evaluasi Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah

Untuk diketahui bahwa program kerja Komite Sekolah yang dimaksudkan di sini adalah suatu usaha sadar dan sengaja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (khususnya orangtua siswa) dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, yang sengaja difokuskan kepada dua kriteria besar yaitu:

1. Melakukan evaluasi dan identifikasi potensi, masalah atau hambatan dan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sana.
2. Mengevaluasi penyusunan program kerja Komite Sekolah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) melalui berbagai kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (*stakeholders*), antara lain: kepala sekolah, guru, masyarakat (orangtua siswa), pengurus Komite Sekolah dan himpunan alumni SMP Negeri I Sungai Pakning.

1. Melakukan Kegiatan Evaluasi dan Identifikasi

a. Evaluasi dan Identifikasi Potensi

SMP Negeri I Sungai Pakning memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Potensi aktual yang dimiliki oleh SMP Negeri I Sungai Pakning dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) SMP Negeri I Sungai Pakning merupakan satu-satunya SMP Negeri yang berada di Kelurahan Sungai Pakning dan telah berdiri cukup lama. Di kelurahan Sungai Pakning (Kelurahan Kota) tersebut, terdapat banyak sekali penduduk usia sekolah, sehingga keberadaan SMP Negeri I Sungai Pakning berpotensi untuk mendapat kesempatan cukup besar dalam hal meningkatkan sumberdaya manusia di sana.
- (2) Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning terbentuk pada tanggal 20 Februari 2003. Komite Sekolah yang terdiri atas berbagai *stakeholders* (orangtua siswa, guru, tokoh masyarakat dan kalangan industri) sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.
- (3) Keberadaan orangtua siswa, tokoh masyarakat dan alumni berpotensi berpartisipasi dalam penyelenggaraan meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Keberadaan Komite Sekolah memberikan akses bagi masyarakat dan alumni untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

b. Evaluasi dan Identifikasi Hambatan

Mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi SMP Negeri I Sungai Pakning dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis partisipasi masyarakat terdiri atas tiga komponen penting pembahasan yaitu:

- (1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan atau masalah serta kendala yang dihadapi oleh sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning.
- (2) Mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan atau masalah serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat atau orangtua siswa SMP Negeri I Sungai Pakning.
- (3) Mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan atau masalah serta kendala yang dihadapi oleh pengurus Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning.

Melakukan berbagai kegiatan evaluasi dan identifikasi permasalahan yang dimaksudkan di atas harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (*stakeholders*), antara lain : kepala sekolah, guru, masyarakat (orangtua siswa) dan pengurus Komite Sekolah melalui wawancara mendalam dan pengamatan atau observasi terlibat. Hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan yang berulang kali difokuskan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh masing-masing *stakeholders* sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning.

(1) Hambatan Sekolah

Hambatan sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kegiatan di sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning adalah : kesulitan pihak sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning untuk mengundang masyarakat atau orangtua siswa SMP Negeri I Sungai Pakning, banyak orangtua siswa SMP Negeri I Sungai Pakning yang tidak memenuhi undangan pihak sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, karena ada keperluan mencari nafkah hidup masing-masing.

Selain itu hambatan sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning adalah kurang berfungsinya Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat atau orangtua siswa SMP Negeri I Sungai Pakning dalam berpartisipasi untuk penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi. Kurang berperannya Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, karena pengurus Komite Sekolah SMP

Negeri I Sungai Pakning sering berganti dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam wadah Komite Sekolah tersebut.

Sarana dan prasarana sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning. Selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri I Sungai Pakning masih belum memadai. Keberadaan sarana dan prasarana dapat mendorong untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

(2) Hambatan Masyarakat Atau Orangtua Siswa

Berdasarkan analisis partisipasi masyarakat atau orangtua siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat diambil kesimpulan antara lain :

a) Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat atau orangtua siswa dalam perencanaan kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat atau orangtua siswa dalam perencanaan dipengaruhi oleh hambatan-hambatan, antara lain:

(1) Sebagian besar orangtua siswa tidak bisa menghadiri undangan dari pihak sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, karena mengutamakan kebutuhan hidup atau mencari nafkah. Biasanya pihak sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning mengundang orangtua siswa pada pagi hari sehingga banyak orangtua siswa yang bekerja, olehkarenanya orangtua siswa yang hadir dalam pertemuan di sekolah sedikit sekali.

(2) Sikap mental orangtua siswa yang menilai negatif terhadap pihak sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, karena setiap kali orangtua menghadiri undangan itu, hanya membicarakan tentang dana atau uang untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Padahal orangtua siswa banyak yang tidak memiliki dana untuk menyumbang kegiatan di sekolah, sehingga orangtua siswa tidak menghadiri undangan dari sekolah

tersebut, mengelak-ngelak dan mencari alasan.

b) Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat atau orangtua siswa dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning dapat dikatakan masih rendah, karena banyak masyarakat (orangtua siswa) tidak mampu memberikan sumbangan dalam bentuk uang kepada sekolah. Sebagian besar masyarakat (orangtua siswa) berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

c) Hambatan Partisipasi Dalam Pengawasan

Partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam pengawasan kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning tergolong masih rendah. Hambatan rendahnya partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam pengawasan adalah keseganan orangtua siswa untuk menegur apabila ada penyimpangan dalam kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam kontribusi dan penyusunan rencana kegiatan di sekolah, pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan pengawasan terhadap kinerja Komite Sekolah masih tergolong rendah.

(3) Hambatan Pengurus Komite Sekolah

Dalam rapat penyusunan program kerja yang dirancang oleh Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning, tidak mendapat respon dari orangtua siswa, sebab banyak orangtua siswa tidak terbiasa berbicara dalam forum resmi.

Diantara berbagai masalah yang dianalisis, diputuskan masalah strategis yang dipilih menjadi prioritas untuk segera dibahas solusinya yaitu: pelaksanaan peranan Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning masih belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Stakeholders (masyarakat, guru dan pengurus Komite Sekolah) menilai bahwa

apabila dua masalah krusial teratasi, masalah lainnya akan secara otomatis ikut teratasi.

(4) Kebutuhan Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Berdasarkan evaluasi dan identifikasi potensi masalah peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat, kemudian mengoptimalkan peranan Komite Sekolah yang ada dengan melibatkan peran masyarakat, guru dan pengurus Komite Sekolah, maka diputuskanlah bahwa Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning merupakan wadah organisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dipertegasakan pula bahwa keberadaan Komite Sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite Sekolah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah mulai dari tahap penyusunan kebijakan pendidikan sekolah, pelaksanaan sampai pada tahap pengontrolan kegiatan di sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

2. Evaluasi Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning

Berdasarkan evaluasi dan identifikasi hambatan atau masalah partisipasi orangtua siswa atau masyarakat dalam kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, maka perlu dikaji dan dianalisis penyusunan program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

a. Program Utama I Tentang Pelatihan Bagi Stakeholders Utama Komite Sekolah (Masyarakat Atau Orangtua Siswa)

Tujuan kegiatan pelatihan tentang Komite Sekolah agar masyarakat dalam hal ini adalah orangtua siswa mengerti hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi di Komite

Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Di dalam pelatihan tentang Komite Sekolah, terlebih dahulu *trainer* dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi tentang keberadaan Komite Sekolah sebagai pengganti BP3 dan menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam Komite Sekolah.

Tujuan sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada orangtua siswa SMP Negeri I Sungai Pakning tentang pentingnya peranan orangtua siswa dalam berbagai kegiatan di sekolah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Sebagai wujud pentingnya peran orangtua siswa dalam kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning adalah adanya tiga perwakilan orangtua siswa sebagai pengurus Komite Sekolah.

Setelah proses sosialisasi tentang keberadaan Komite Sekolah, masyarakat diberikan pelatihan tentang hak dan kewajibannya dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, antara lain:

(1) Mekanisme dan pengetahuan pelaksanaan peranan orangtua siswa dalam memberikan masukan/pertimbangan kepada SMP Negeri I Sungai Pakning mengenai kebijakan dan program pendidikan. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria sekolah, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

(2) Mekanisme dan indikator evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

(3) Pelatihan kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orangtua siswa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan SMP Negeri I Sungai Pakning, selain itu kegiatan tersebut juga memotivasi orangtua siswa agar memiliki kepedulian untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Kegiatan pelatihan monitoring

dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

b. Program Utama II Tentang Penerapan Subsidi Silang

Faktor dana merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut dana perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang memiliki kedekatan emosional/ kekeluargaan dengan SMP Negeri I Sungai Pakning, yaitu: orangtua siswa yang mampu secara ekonomi, dunia usaha/industri terdekat, alumni dan pihak lainnya. Diharapkan pihak-pihak tersebut mampu memberikan kontribusi finansial untuk kelancaran kegiatan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Penggalangan dana dari berbagai *stakeholders* SMP Negeri I Sungai Pakning difasilitasi oleh Komite Sekolah. Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning mengundang berbagai komponen SMP Negeri I Sungai Pakning untuk menjelaskan permasalahan keterbatasan dana pendidikan, dan berusaha untuk menggalang dana dari berbagai *stakeholders*.

Hasil penggalangan dana pendidikan dari berbagai *stakeholders* digunakan untuk program subsidi silang. Mekanisme subsidi silang tersebut adalah sebagai berikut: penggalangan dana dari berbagai *stakeholders* dikumpulkan oleh Komite Sekolah dan dibayarkan kepada pihak Sekolah sebagai pelunasan kewajiban Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) siswa yang kurang mampu serta keperluan belajar lainnya (buku pelajaran, buku tulis, seragam sekolah, sepatu dan lain-lain). Program subsidi silang diharapkan selain mengatasi permasalahan dana pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, juga mengurangi kesenjangan/ kecemburuan sosial antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu di SMP Negeri I Sungai Pakning.

c. Program Utama III Tentang Sponsorship dalam Berbagai Kegiatan Di SMP Negeri I Sungai Pakning

Orangtua siswa perlu dilibatkan sebagai panitia atau sponsor kegiatan di sekolah yang bersifat kemasyarakatan, seperti perpisahan, peringatan hari besar nasional maupun keagamaan, pesta seni, dan kegiatan sekolah lainnya. Namun dipilih orangtua siswa yang memiliki hobi atau aktivitas sehari-hari yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Penunjukan orangtua siswa sebagai panitia dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri I Sungai Pakning menggambarkan pentingnya peranan orangtua siswa dalam kegiatan di sekolah, sehingga memotivasi orangtua siswa berpartisipasi dalam kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning. Penunjukan orangtua siswa dalam kegiatan di SMP Negeri I Sungai Pakning juga memberikan keuntungan bagi pihak sekolah, beban sekolah semakin berkurang karena dibantu oleh orangtua siswa, dapat terjalin hubungan yang harmonis antara orangtua siswa dengan pihak sekolah.

d. Program Utama IV Tentang Pertemuan Rutin Antara Orangtua Siswa, Komite Sekolah dan Para Guru

Tujuan pertemuan rutin antara orangtua siswa, Komite Sekolah dan guru adalah untuk memberikan suatu wadah silaturahmi antara orangtua siswa, Komite Sekolah dan guru SMP Negeri I Sungai Pakning, sehingga pertemuan tersebut dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara berbagai *stakeholders* SMP Negeri I Sungai Pakning.

Sebagai wujud komitmen SMP Negeri I Sungai Pakning untuk menyalurkan aspirasi orangtua siswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning adalah memberikan kesempatan kepada orangtua siswa untuk menyampaikan pendapat dalam pertemuan tersebut. Orangtua siswa diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Sementara pihak sekolah memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, antara lain : prestasi siswa SMP Negeri Sungai Pakning, kegiatan intra dan ekstra kurikuler siswa SMP Negeri I Sungai Pakning, keadaan sarana dan prasarana, kondisi guru dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi SMP Negeri I Sungai Pakning dan mengharapkan partisipasi orangtua siswa dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Dalam pertemuan tersebut, Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning juga melakukan laporan pertanggung-jawaban tentang peran yang telah dilakukannya, dengan tujuan agar kinerja Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning lebih baik dalam melaksanakan peranannya.

Secara garis besar Komite Sekolah SMP Negeri I Sungai Pakning sesuai dengan perannya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

(1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun dalam pencapaian tujuan program sekolah.

(2) Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Diharapkan pertemuan rutin antara orangtua siswa, Komite Sekolah dan guru selain dapat melakukan komunikasi yang intensif adalah mewujudkan kerjasama antar komponen SMP Negeri I Sungai Pakning dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

KESIMPULAN

Program kerja Komite Sekolah adalah suatu usaha sadar dan sengaja serta perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (khususnya orangtua siswa)

dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning.

Program kerja Komite Sekolah harus melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan yang melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (stakeholders), antara lain : kepala sekolah, guru, orangtua siswa, pengurus Komite Sekolah, himpunan alumni, tokoh masyarakat dan kalangan pengusaha serta industri.

Berdasarkan evaluasi dan identifikasi permasalahan atau hambatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning, maka disusunlah program kerja Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning tersebut.

Adapun program kerja Komite Sekolah yang telah disusun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (orangtua siswa) dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning adalah :

1. Pelatihan tentang Komite Sekolah agar masyarakat (orangtua siswa) mengetahui hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi di Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri I Sungai pakning.
2. Penerapan subsidi silang yaitu masyarakat (orangtua siswa) yang mampu secara ekonomi memberikan subsidi kepada siswa yang kurang mampu secara finansial.
3. Pelibatan orangtua siswa sebagai panitia dalam kegiatan di sekolah dan pertemuan rutin antara orangtua siswa, Komite Sekolah dan para guru.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, Robert C and Biklen, Sari Knopp, 1982, *Qualitative Research for Education : an introduction and Theory and Methodes*, Boston, Alyyn an Bacon Inc.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2008. *Buku Petunjuk Penggunaan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan*

Dana Rutin Sekolah Tahun Anggaran 2008. Bengkalis.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1999. *Panduan Manajemen Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta.

_____, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*. Departemen Pendidikan Nasional RI. Jakarta.

_____, 2002. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

Lewis, J. Dan P. Walker, 2001, *Menwujudkan Partisipasi. 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, Participation Works, New Economics Foundation The British Council.

Madrie, 1986, *Beberapa Faktor Penentu Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Disertasi)*, Program Pascasarjana Institut Pertanian. Bogor.

Mikkelsen, B. 2001, *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Pamuji, Otok S. 1997, *Menuju Pendekatan Pembangunan yang Partisipatif*, Buletin Bina Swadaya No. 11 Tahun V, September 1997.

Poerbakawatja, Soegarda. 1980, *Ensiklopedia Pendidikan*, Kanisius. Yogyakarta.

Prishardoyo, 2002, *Komite Sekolah Sekedar Neo BP3*, Suara Merdeka. Senin, 21 Oktober 2002. Semarang.

Purwanto, N. 1987, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya.

Sahidu, A. 2007, *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Laban Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa*

- Tenggara Barat (Disertasi)*, Program Pascasarjana. IPB-Bogor.
- Singarimbun, dan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Spradley, J.S, 1990, *Participan Observation*, Holt, Reneland ang Winston, New York
- Wahjosumidjo, 2002, *Kepemimpinan Kepala Sekolah. Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.